

PEMETAAN DATABASE RAWAN KONFLIK KABUPATEN BULELENG

**I Nengah Suastika¹, A.A. Istri Dewi Adhi Utami²,
I Wayan Budiarta³, Ketut Arsudipta⁴**

¹²³Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan
Ganesha, Indonesia

⁴Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

email:

nengah.suastika@undiksha.ac.id, dhi.utami@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi konflik sosial, ekonomi, budaya, agama dan politik di Kabupaten Buleleng. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan kualitatif dan kuantitatif dalam paradigma kebijakan publik. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis faktor pemicu konflik, faktor yang terlibat konflik, intensitas konflik dan memformulasi kebijakan minimalisasi potensi konflik. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk memetakan daerah rawan konflik di Kabupaten Buleleng dan tingkat kerawanan konflik di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 129 Desa. Hasil penelitian menunjukkan aspek-aspek pemicu terjadinya konflik di Kabupaten Buleleng adalah masalah politik, tapal batas desa, kriminalitas, agama, ekonomi, pendidikan, kepadatan penduduk, konflik agraria, masalah adat dan kekumuhan. Namun secara realistis masalah politik dan tapal batas memiliki daya ledak yang paling tinggi. Secara kuantitatif Kecamatan Buleleng merupakan Kecamatan yang menduduki tingkat kerawanan konflik paling tinggi dibandingkan dengan sembilan kecamatan lainnya. Kecamatan Seririt menduduki posisi nomor dua sebagai kecamatan yang rawan konflik. Kecamatan Banjar menjadi kecamatan yang berada pada urutan nomor tiga sebagai kecamatan rawan konflik dibandingkan dengan sembilan kecamatan lainnya. Rencana tidak lanjut yang relevan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah: (1) meningkatkan kewaspadaan pada tiga wilayah yang memiliki tingkat kerawanan konflik paling tinggi, (2) secara khusus melakukan kewaspadaan pada desa atau kelurahan yang masuk kategori rawan konflik, (3) membuatkan regulasi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan wilayah industri pada Kecamatan Gerokgak, dan (4) melakukan pengamanan secara lebih intens pada desa-desa yang memiliki calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati atau Wakilpupati yang akan maju pada Pemilu.

Kata kunci: konflik, pemetaan, kebijakan

PENDAHULUAN

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Bali dengan tingkat kerawanan konflik yang cukup tinggi dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya yang ada di Bali (Prasetya, K. K., 2021). Kajian yang dilakukan oleh beberapa akademisi menemukan beberapa sumber konflik yang terjadi di Kabupaten Buleleng, yaitu: (1) Perbedaan pilihan politik. Perbedaan pilihan politik bertalian dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, DPD, Gubernur, Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa. Konflik politik yang menyisakan traumatik adalah konflik Banjar, yakni konflik berdarah yang melibatkan Desa Banjar, Sidatapa, Pedawa, dan Cempaga. Selain konflik Banjar, konflik politik yang paling hangat adalah pembakaran gendung-gedung Pemerintahan Kabupaten Buleleng saat pemilihan Presiden tahun 1999 yang menyebabkan beberapa gedung pemerintahan dirusak dan dibakar dan adanya penjarahan di beberapa toko yang ada di Kabupaten Buleleng; (2) Kemiskinan. Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta merta akibat dari malas bekerja, terdapat faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi situasi ini. Isu kemiskinan memberikan kontribusi yang bersifat linier terhadap kriminalitas, termasuk juga konflik sosial; (3) Keberagaman etnis. Keberagaman etnis merupakan kekuatan dan potensi yang sangat besar untuk memajukan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman etnis juga sering menimbulkan gesekan sosial yang tak jarang berujung pada konflik multi etnis (Indrawan, J., & Lutfi, A. P. K., 2021); (4) Adat. Adat istiadat yang ada di Kabupaten Buleleng sangat beragam sesuai dengan keadaan, tempat dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Konflik adat sering dipicu dengan permasalahan warga adat yang membangkang dalam kegiatan upacara adat, sehingga diberikan sanksi *kesepekan* atau dikucilkan dari Desa Adat. Selain itu, masalah kuburan dan asset desa adat sering menjadi pemicu terjadinya konflik adat; (4) Agama. Kabupaten Buleleng yang mudah dijangkau lewat jalur laut dan darat serta karakter masyarakat yang egaliter dihuni oleh masyarakat dengan beragam agama. Potensi konflik agama bertalian dengan perasangka keyakinan dan nilai-nilai yang memicu terjadinya gesekan di masyarakat; (5) Tingkat pendidikan. Salah satu upaya umat manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui proses pendidikan. Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap pola pikir, nilai-nilai dan perspektif yang digunakan untuk memandang permasalahan atau fenomena. Perbedaan perspektif dalam menyikapi sesuatu dalam masyarakat akan menyebabkan terjadinya konflik sosial; (6) Batas wilayah. Batas wilayah Desa Dinas, Desa Adat dan Kelurahan di Kabupaten Buleleng tidak jarang menyebabkan terjadinya gesekan yang berimplikasi pada konflik sosial. Sedikitnya 23 desa di wilayah Kabupaten Buleleng masih terbelit masalah tapal batas. Dari 23 desa yang masih terbelit konflik tapal batas tersebut, 7 di antaranya berada di Kecamatan Banjar, yakni Desa Gobleg, Desa Kayuputih, Desa

Banyuatis, Desa Banyuseri, Desa Banjar, Desa Banjar Tegeha, dan Desa Dencarik. Sedangkan di wilayah Kecamatan Seririt juga terdapat 7 desa terbelit konflik tapalk batas, yakni Desa mayong, Desa Bestala, Desa Kalianget, Desa Tangguwisia, Desa Ularan, Desa Lokapaksa, dan Kelurahan Seritit. Sementara 9 desa terbelit konflik tapal batas lainnya tersebar di 4 kecamatan, yakni Desa Celukan Bawang (Kecamatan Gerokrak), Desa Pengulon (Kecamatan Gerokgak), Desa Patas (Kecamatan Gerokgak), Desa Gerokgak (Kecamatan Gerokgak), Desa Selat (Kecamatan Sukasada), Desa Kubutambahan (Kecamatan Kubutambahan), Desa Bulian (Kecamatan Kubutambahan), Desa Desa Giri Emas (Kecamatan Sawan), dan Desa Bungkulun (Kecamatan Sawan) Keempat potensi konflik ini muncul pada masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan yang ada di Kabupaten Buleleng (Ikram, I., Susetyo, S., & Raidar, U., 2020; Nusa Bali.com, 23 Desember 2018).

Lebih spesifik pada masyarakat perkotaan selain tujuh permasalahan tadi pemicu konflik yang urgen adalah; (1) Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati. Semakin banyak penduduk yang tinggal di suatu daerah dengan luas yang semakin sempit, maka kawasan tersebut dapat dikatakan sebagai kawasan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk menyebabkan kurangnya lahan pekerjaan yang berimplikasi pada pengangguran dan rendahnya pendapatan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial; (2) Kekumuhan tempat tinggal. Kekumuhan merupakan gambaran permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP). Kekumuhan identik dengan pengangguran, kemiskinan dan komunitas patologi sosial masyarakat yang menjadi pemicu terjadinya konflik sosial; (3) Tidak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Intensitas tindak pidana yang tinggi sering menjadi pemicu konflik sosial yang lebih besar, yang bukan saja berkaitan dengan tindak pidana, akan tetapi bisa menjadi konflik kelompok, etnis, agama atau antar warna (Barron, P., Kaiser, K., & Pradhan, M., 2004; Sandia, K., Sastrawan, I. K. W., & Surata, I. N. 2014). Kajian di atas senada dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Pasal 5 konflik dapat bersumber dari a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya; b. perseteruan antarumat beragama dan/ atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Terlepas dari semua potensi dan permasalahannya, semua potensi konflik dapat dimanajemen dan diminimalisasi melalui upaya yang bersifat preventif. Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Pasal 1

Ayat (3) Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Lebih jauh pada Pasal 6 Ayat (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya: a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; c. meredam potensi konflik; dan d. membangun sistem peringatan dini. Pembuatan sistem peringatan dini dalam meminimalisasi konflik sosial merupakan upaya strategis untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Pembuatan sistem peringatan dini ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat dengan menggandeng perguruan tinggi dan akademisi yang memiliki kualifikasi akademik yang sejalan dengan permasalahan yang ada di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Pencegahan konflik dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Undang-Undang No. 7 Tahun 2012). Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintahan Kabupaten Buleleng dapat membuat *database* rawan konflik daerah Kabupaten Buleleng. Pemetaan daerah rawan konflik akan memuat mengenai sumber-sumber konflik di desa, kelurahan dan kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng, peta tingkat potensi konflik pada tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten, dan strategi minimalisasi potensi konflik di Kabupaten Buleleng. Kajian ini akan menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pembuatan kebijakan dalam bidang sosial politik, pertahanan dan keamanan. Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat membuat program yang lebih tepat sasaran sesuai dengan hasil penelitian. Berdasarkan pada rasional tersebut, tampaknya analisis pemetaan konflik di Kabupaten Buleleng Menjelang Pemilu tahun 2024 sangat urgen dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya permasalahan.

METODE

Sesuai dengan masalah pemetaan *database* rawan konflik di Kabupaten Buleleng, maka lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, 19 (sembilan belas) Kelurahan dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Desa. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan kalender mulai tanggal 01 Maret 2023 sampai 31 Agustus 2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumen, kuesioner, dan *focus group discussion*. Pengembangan instrumen penelitian diawali dengan perumusan konsep, pembuatan kisi-kisi, pembuatan instrumen, uji judges, uji validitas dan reliabilitas dan revisi instrumen penelitian, hingga siap digunakan (Sugiyono, 2010). Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif, diawali dengan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data dan mengklasifikasi data secara menyeluruh berdasarkan kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian. Sedangkan secara kuantitatif teknik

pengolahan dan analisis data akan diawali dengan pengumpulan data, uji persyaratan analisis, menghitung data dengan bantuan sistem informasi geografi (*geographic information system*) untuk memetakan potensi konflik di Kabupaten Buleleng (Creswell, J. W., 2008; Sugiyono, 2010).

PEMBAHASAN

A. Aspek-Aspek yang Menjadi Pemicu Terjadinya Konflik di Kabupaten Buleleng

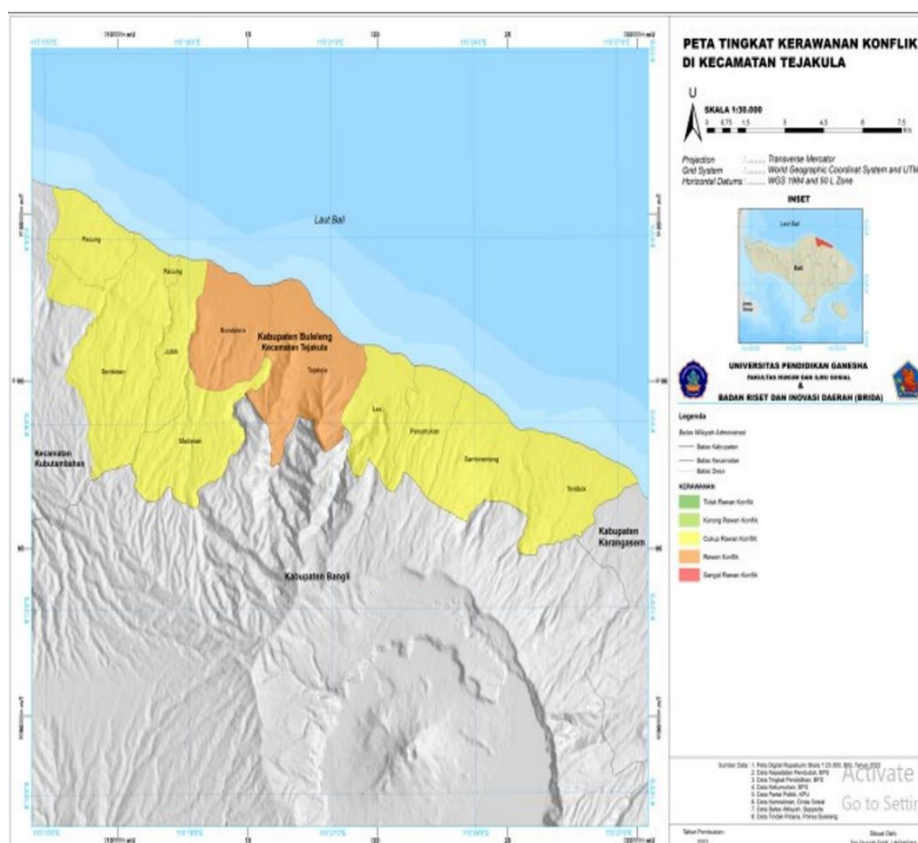
Berdasarkan pada analisis konseptual dan kondisi empirik di Kabupaten Buleleng yang terungkap dalam kegiatan *focus group discussion* yang dilakukan pada sembilan kecamatan, ada beberapa aspek yang disinyalir akan menjadi pemicu terjadinya konflik. **Pertama**, perbedaan pilihan politik. Perbedaan pilihan politik bertalian dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan Pemilihan Kepala Desa. Konflik politik yang menyisakan traumatik adalah konflik Banjar, yakni konflik berdarah yang melibatkan Desa Banjar, Sidatapa, Pedawa, dan Cempaga. Selain konflik Banjar, konflik politik yang paling hangat adalah pembakaran gedung-gedung Pemerintahan Kabupaten Buleleng saat pemilihan Presiden tahun 1999 yang menyebabkan beberapa gedung pemerintahan dirusak dan dibakar dan adanya penjarahan di beberapa toko yang ada di Kabupaten Buleleng. **Kedua**, masalah ekonomi. Persoalan ekonomi berkaitan dengan perebutan sumber daya dan ketimpangan ekonomi serta kemiskinan. Aspek-aspek ini akan menjadi dasar pemicu persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki kantong-kantong kemiskinan yang dalam. **Ketiga**, masalah kriminalitas. Kriminalitas merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat melanggar nilai dan norma hukum serta perilaku tersebut dapat meresahkan dan merugikan banyak pihak baik dirinya sendiri sebagai pelaku terlebih lagi orang lain yang menjadi korban dari tindakan tersebut. Kriminalitas dapat dilakukan oleh individu, kelompok maupun komunitas. Kriminalitas ini mencakup semua kegiatan yang tidak disetujui atau ditolak oleh masyarakat karena merupakan suatu tindakan yang melanggar norma agama, sosial dan hukum yang tentunya berbahaya baik secara psikologis maupun ekonomi. **Keempat**, masalah batas wilayah Desa. Batas wilayah Desa Dinas, Desa Adat dan Kelurahan di Kabupaten Buleleng tidak jarang menyebabkan terjadinya gesekan yang berimplikasi pada konflik sosial. Sedikitnya 23 desa di wilayah Kabupaten Buleleng masih terbelit masalah tapal batas. **Kelima**, masalah Desa Adat. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selain kelima masalah di atas, variable-variabel lain belum menjadi pemicu utama konflik di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Seperti variable keberagaman agama. Keberagaman agama merupakan kekuatan dan potensi yang sangat besar untuk memajukan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman agama juga sering menimbulkan gesekan sosial yang tak jarang berujung pada konflik multi agama (Indrawan, J., & Lutfi, A. P. K., 2021). Tingkat pendidikan. Salah satu upaya umat manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui proses pendidikan. Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap pola pikir, nilai-nilai dan perspektif yang digunakan untuk memandang permasalahan atau fenomena. Kepadatan penduduk menyebabkan kurangnya lahan pekerjaan yang berimplikasi pada pengangguran dan rendahnya pendapatan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial. Kekumuhan tempat tinggal. Kekumuhan merupakan gambaran permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP). Kekumuhan identik dengan pengangguran, kemiskinan dan komunitas patologi sosial masyarakat yang menjadi pemicu terjadinya konflik sosial.

B. Pemetaan Kerawanan Konflik Tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Berdasarkan pada hasil *focus group discussion* yang dilakukan pada semua kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng terungkap beberapa hal prinsip yang terjadi pada masing-masing kecamatan. Pada Kecamatan Tejakula vareabel dominan yang memungkinkan memicu terjadinya konflik adalah partai politik, ekonomi, tapal batas, agama, adat dan kriminalitas. Vareabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Masalah kriminalitas bertalian dengan perkelaian yang dipicu balapan liar serta kasus pencurian yang biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. Masalah batas wilayah masih menjadi persolan, karena ada beberapa Desa di Kecamatan Tejakula yang belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa di Kecamatan Tejakula ada pada kategori rawan konflik dan cukup rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif

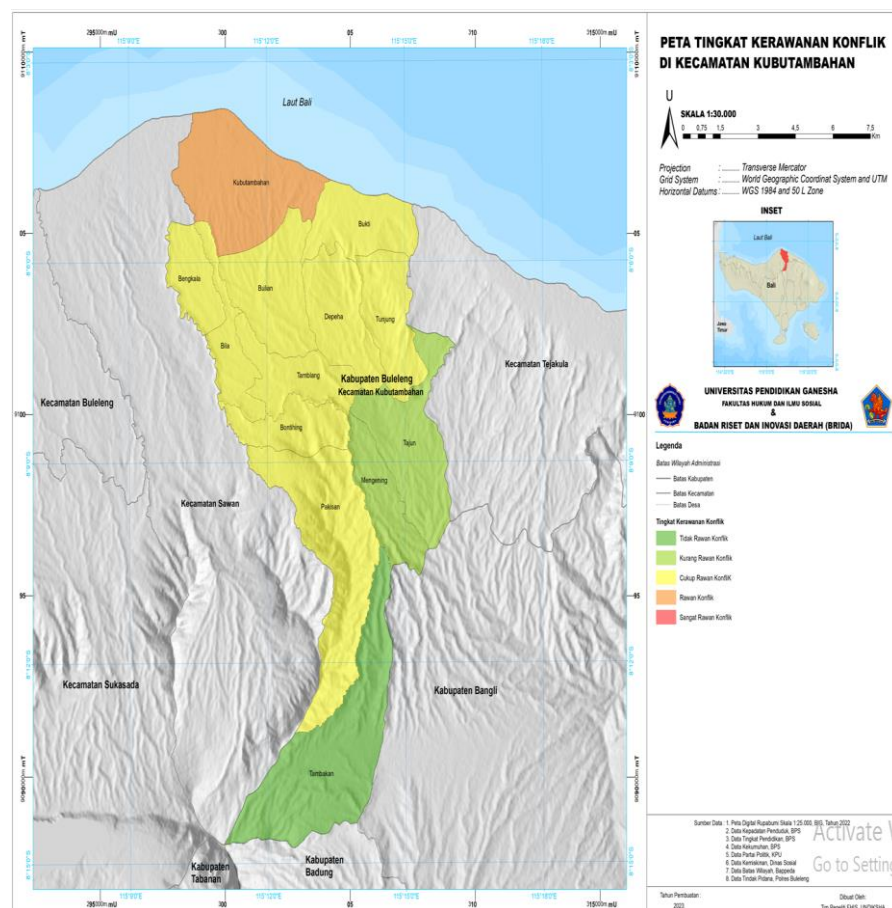
pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Tejakula dapat disajikan sebagai berikut:



Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kubutambahan lebih kompleks dibandingkan dengan Kecamatan Tejakula, karena menyangkut partai politik, ekonomi, kriminalitas dan tapal batas antar desa. Hampir sama dengan Kecamatan Tejakula, variabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Selain masalah politik, masalah ekonomi juga masih rentan memicu terjadinya konflik di wilayah Kecamatan Kubutambahan. Permasalahan yang masing hangat sampai saat ini adalah permasalahan perusahaan kendang babi yang dinilai menyebabkan terjadinya pencemaran udara di sekitar perisahaan. Masalah kriminalitas hanya berkaitan dengan adanya pemuda yang berkelahi dengan pemuda desa tetangga yang biasanya mampu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat atau perdamaian. Sedangkan persoalan intern umat beragama berkaitan dengan pernah adanya aliran wali yang menyebabkan adanya ketegangan antar masyarakat. Selain itu, ada permasalahan berkaitan dengan tapal batas antar desa, karena belum bisa disepakati bersama batas-batas wilayah desanya masing-masing. Disisi lain adanya warga

yang berasal dari desa berbeda dengan wilayah tempat tinggalnya menyebabkan kesulitan dalam penentuan batas wilayah.

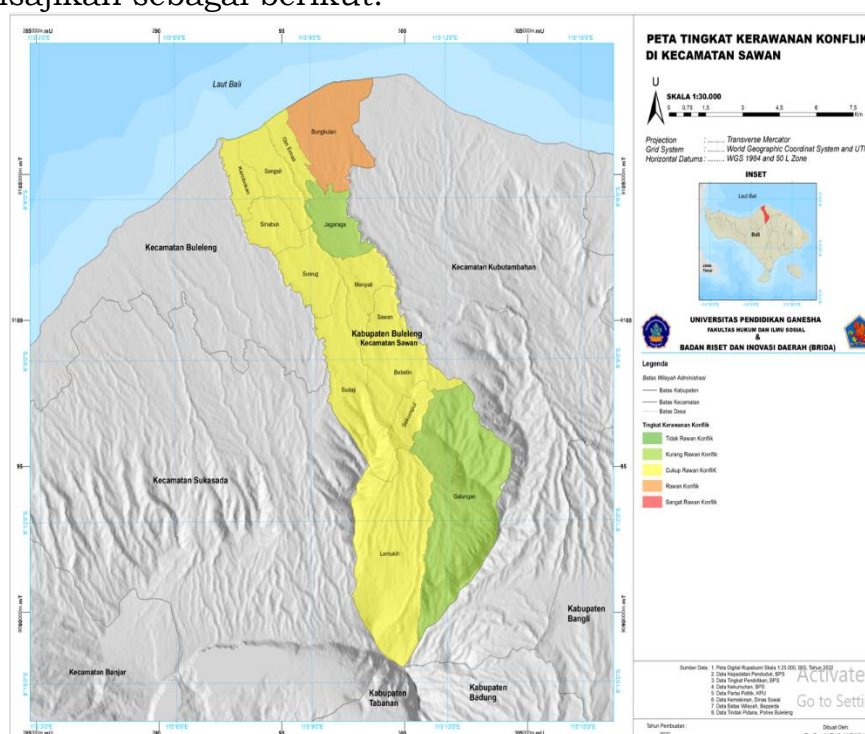
Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa di Kecamatan Kubutambahan ada pada kategori cukup rawan konflik, cukup rawan konflik, kurang rawan konflik dan tidak rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Kubutambahan dapat disajikan sebagai berikut:



Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Sawan hampir sama dengan Kecamatan Kubutambahan, karena menyangkut partai politik, kriminalitas dan adat. Variabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Terdapat lima anggota dewan yang bersasal dari empat partai politik. Perbedaan

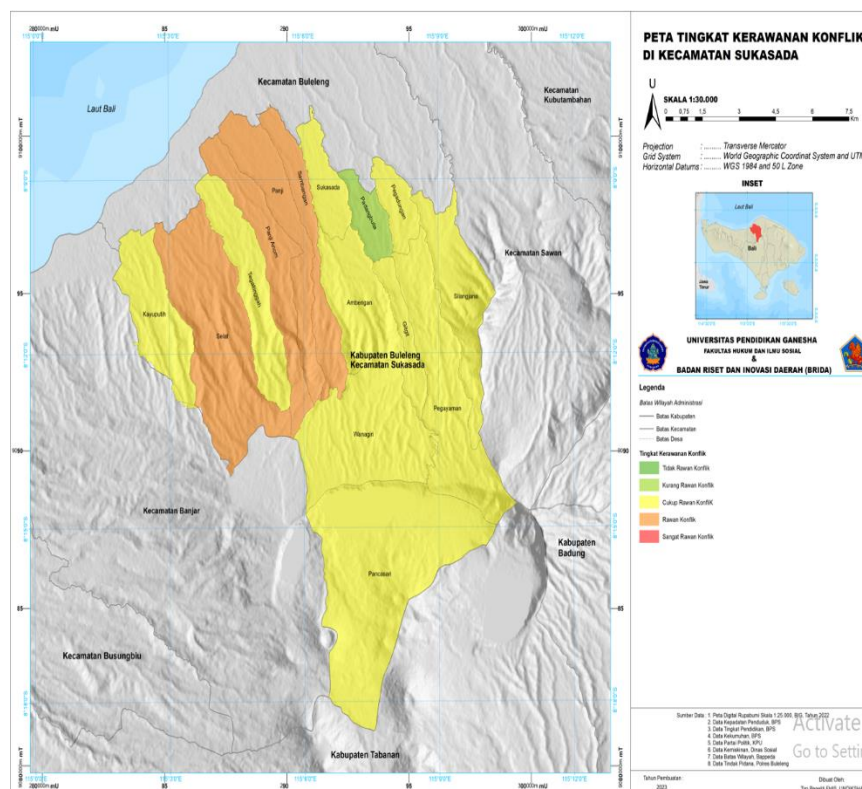
partai politik asal anggota dewan memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan yang berimplikasi pada permasalahan konflik politik. Masalah kriminalitas berkaitan dengan adanya kasus-kasus pencurian yang biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pencurian ini biasanya dilakukan oleh perorangan yang telah diatasi dengan cara pengetatan penduduk pendatang dan kegiatan ronda yang rutin dilakukan oleh masyarakat secara sukarela. Selain masalah pencurian perkelahian antar perorangan yang disebabkan oleh kesalah pahaman juga kadang-kadang terjadi pada masyarakat Kecamatan Sawan. Perkelahian antar perorangan ini biasanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai pada aparat kepolisian. Salah satu persoalan yang masing hangat saat ini di Kecamatan Sawan adalah masalah proses *ngadegang* Bendesa Adat. Proses *ngadegang* Bendesa Adat yang merupakan kewenangan otonom Desa Adat mengalami persoalan berkaitan dengan legitimasinya secara yuridis. Berkaitan dengan ini, proses-proses negosiasi untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh masyarakat sedang diusahakan dan dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat.

Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, tapal batas, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa di Kecamatan Sawan ada pada kategori rawan konflik, cukup rawan konflik dan kurang rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Sawan dapat disajikan sebagai berikut:



Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Sukasada berdasarkan hasil kegiatan *focus group discussion* hanya dapat dipicu oleh permasalahan politik, ekonomi, tapal batas, dan kriminalitas. Variabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Disisi lain, Kecamatan Sukasada memiliki calon Bupati yang cukup kuat dengan dukungan yang sangat baik dari masyarakat Kecamatan Sukasada. Tidak dapat dipungkiri, persoalan politik dapat menjadi pemicu terjadinya konflik di Kecamatan Sukasada. Sedangkan masalah ekonomi, bertalian dengan adanya pembangunan jalur Singaraja-Denpasar yang memunculkan pendapatan baru bagi Masyarakat terdampak. Walau demikian permasalahan pembangunan dan pergerakan perekonomian yang disebabkan karena adanya jalur langsung Singaraja-Denpasar dapat menjadi sumber-sumber perebutan ekonomi masyarakat. Implikasinya adalah adanya gesekan dan benturan yang berakibat pada kerawanan konflik di Kecamatan Sukasada. Disisi lain masalah tapal batas menjadi persoalan yang urgen, karena ada beberapa desa yang belum ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati. Hal ini menunjukkan masih adanya potensi konflik karena adanya selisih perbatasan antar desa yang ada di Kecamatan Sukasada. Bahkan beberapa desa telah dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menentukan dan menyepakati batas wilayahnya.

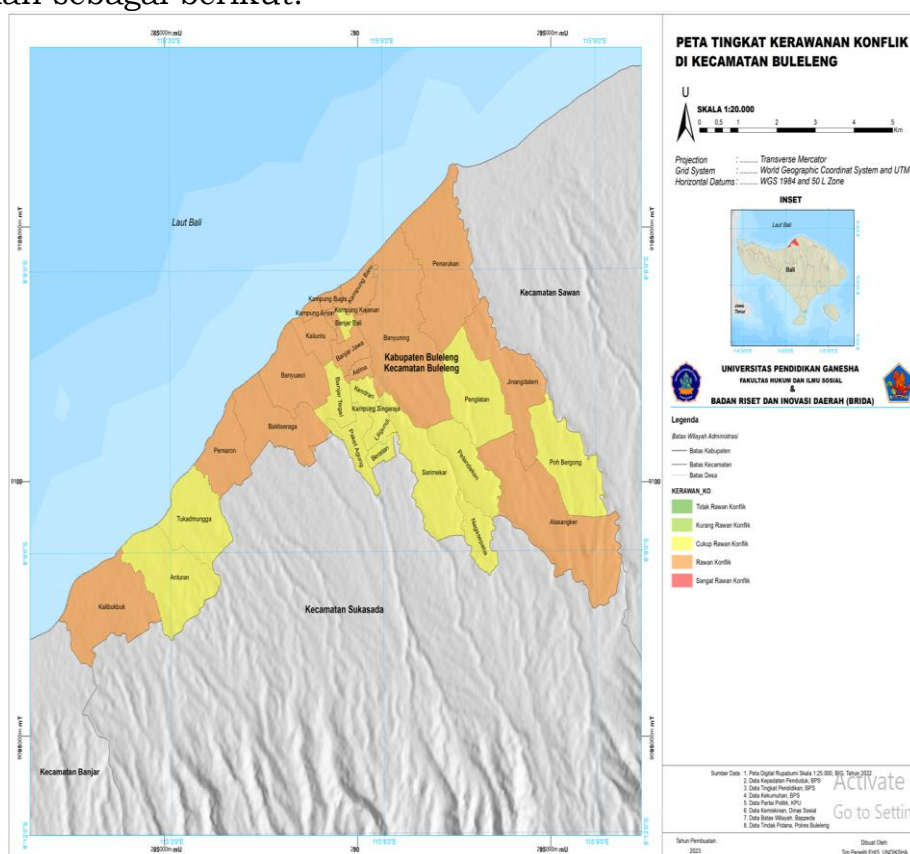
Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa di Kecamatan Sukasada ada pada kategori rawan konflik, cukup rawan konflik dan kurang rawan konflik. Analisis data menunjukkan empat desa ada pada kategori rawan konflik, sepuluh desa ada pada kategori cukup rawan konflik dan satu desa ada pada kategori kurang rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Sukasada dapat disajikan sebagai berikut:



Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Buleleng lebih bertumpu pada permasalahan politik, kriminalitas, tapal batas dan adat. Variabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Terdapat delapan anggota dewan yang bersasal dari lima partai politik. Heterogenitas pilihan secara politik rencan menjadi pemicu terjadinya kerawanan konflik di Kecamatan Buleleng. Masalah lainnya adalah kriminalitas yang berkaitan dengan perkeltahian antar perorangan dan pencurian terhadap rumah-rumah kosan di beberapat tempat. Tidakan kriminalitas ini ada yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan ada juga yang sampai pada aparat penegak hukum yang pada akhirnya sampai di meja hijau. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan kewaspadaan pihak berwajib tindakan kriminalitas ini semakin menurun kuantitasnya. Persoalan yang paling hangat di Kecamatan Buleleng adalah permasalahan adat yang berkaitan dengan proses *ngadegang* Bendesa Adat. Proses *ngadegang* Bendesa Adat ini sangat pelik, karena berkaitan dengan pertentangan intern antar kelompok warga desa adat. Kasus ini sebenarnya telah dimediasi, baik oleh Majelis Desa Adat maupun oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Proses penyelesaian sedapat mungkin dilakukan melalui proses musyawarah untuk menemukan kesepakatan yang membuat semua masyarakat merasa adil. Akan tetapi penyelesaian ini sampai saat ini

belum dapat diterima, karena adanya rasa ketidakadilan dalam penyelesaiannya.

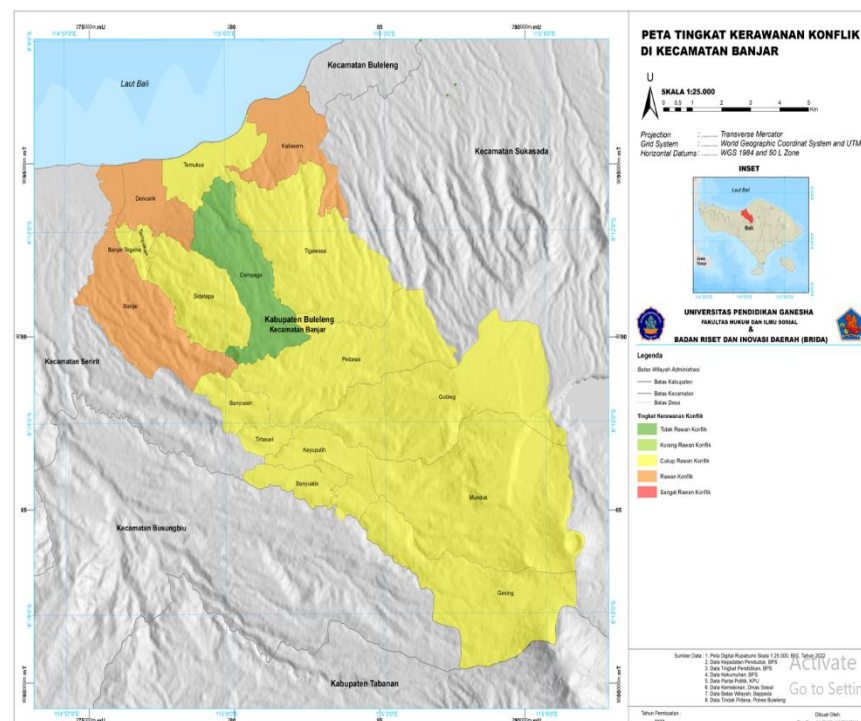
Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa di Kecamatan Buleleng ada pada kategori rawan konflik dan cukup rawan konflik. Analisis data menunjukkan lima belas desa ada pada kategori rawan konflik dan empat belas desa ada pada kategori cukup rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Buleleng dapat disajikan sebagai berikut:



Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Banjar lebih kompleks dibandingkan dengan Kecamatan Sawan karena menyangkut partai politik, ekonomi, kriminalitas dan tapal batas antar desa. Hampir sama dengan Kecamatan Buleleng, variabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Terdapat tujuh orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari enam partai

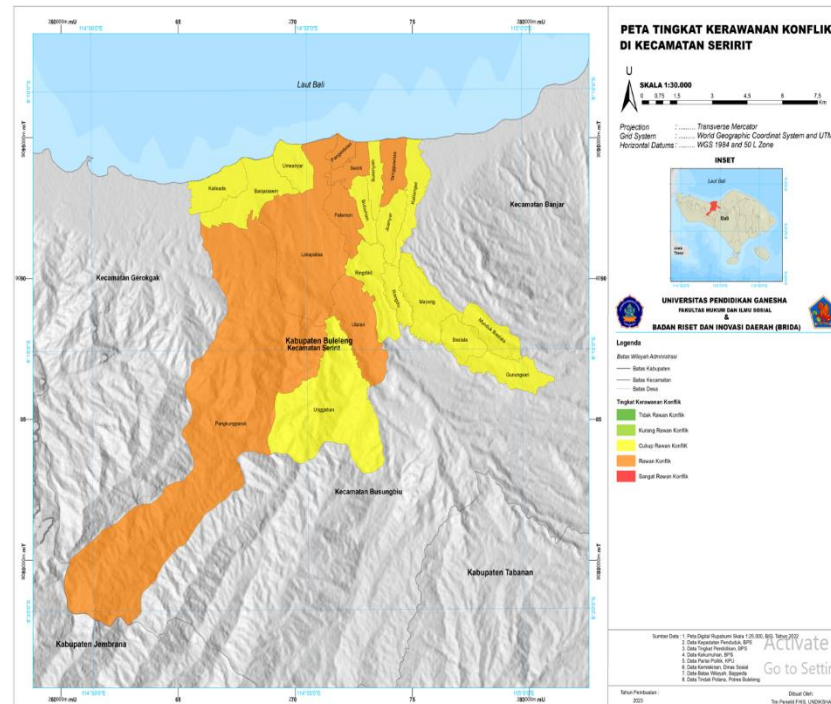
politik. Banyaknya partai politik yang menduduki anggota dewan dan adanya perubahan dapil akan menyebabkan persaingan secara politik semakin meningkat diantara para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya. Masalah lainnya yang sangat urgen adalah masalah tapal batas desa yang banyak mengalami permasalahan antara desa yang satu dengan desai lainnya. Persolan tapal batas ini pada beberapa desa sebenarnya telah dilakukan komunika dan pertemuan antar pengurus desa dinas dan desa adat, namun belum semua dapat diselesaikan. Masalah lainnya yang terjadi di Kecamatan Banjar adalah pencurian dan pengrusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Persoalan pencurian biasanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan semakin hari kasus pencurian semakin menurun. Masalah ekonomi berkaitan dengan masih adanya isu mengenai bantuan sosial yang belum dibagikan secara merata kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang sepatutnya menerima bantuan.

Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa di Kecamatan Banjar ada pada kategori rawan konflik, cukup rawan konflik dan kurang rawan konflik. Ada empat desa yang ada pada kategori rawan konflik, yaitu Kaliasem, Dencarik, Banjar Tegeha dan Banjar. Desa Cempaga masuk kategori kurang rawan konflik dan desa lainnya masuk dalam kategori cukup rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Banjar dapat disajikan sebagai berikut:



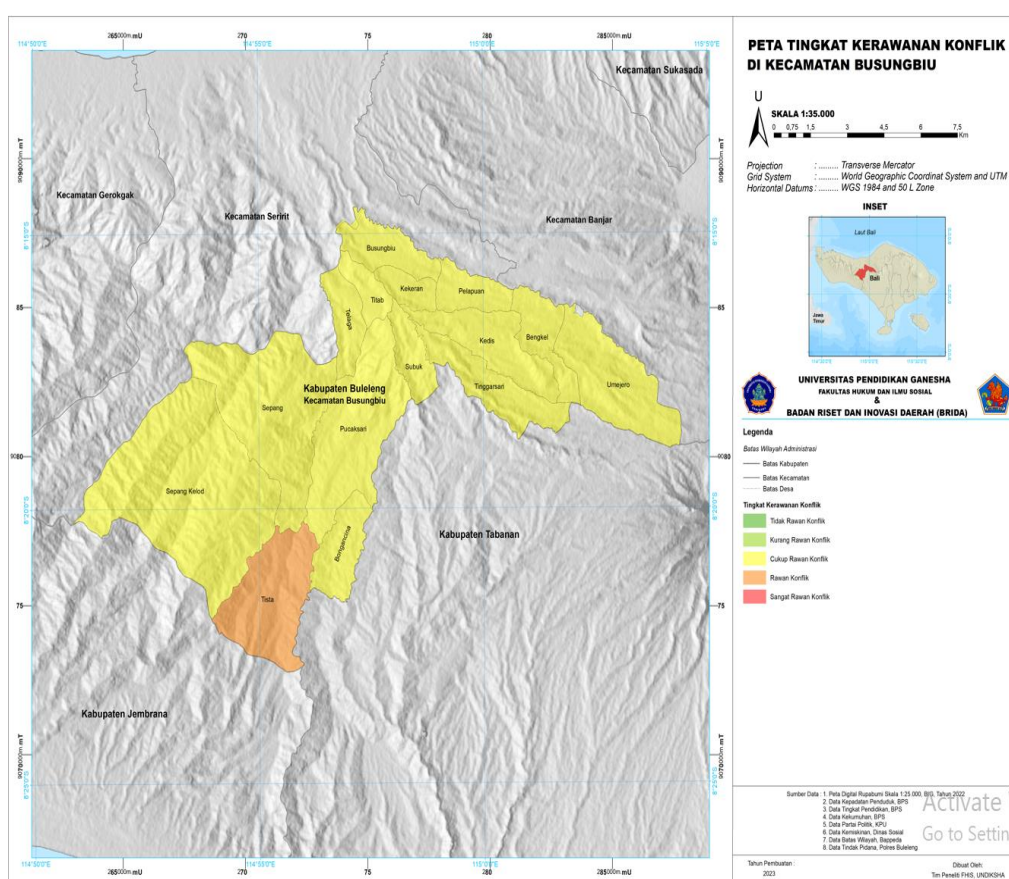
Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Seririt lebih sekompleks dibandingkan dengan masalah yang terjadi pada Kecamatan Banjar. Persoalan yang terjadi di Kecamatan Seririt berkaitan dengan masalah politik, masalah kriminalitas, tapal batas dan masalah adat. Sedangkan variable lainnya tidak pemicu konflik yang bersifat signifikan. Variabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Terdapat lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari lima partai politik. Banyaknya partai politik yang menduduki anggota dewan dan adanya perubahan dapil akan menyebabkan persaingan secara politik semakin meningkat diantara para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kecamatan Seririt. Masalah lainnya adalah kriminalitas bertalian dengan pencurian ternak dan pencurian kayu di Hutan Negara yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan biasanya dapat diselesaikan secara damai. Pencurian pada Hutan Negara ini telah diatasi dengan cara mengajak masyarakat yang berada di sekitar hutan untuk menjaga dan bersama-sama mengawasi kegiatan masyarakat yang mencurigakan. Kriminalitas lainnya yang pernah terjadi dalam tiga tahun terakhir ini di Kecamatan Seririt adalah kasus pelecehan terhadap anak. Kasus ini telah diselesaikan secara yuridis dan diterima oleh semua pihak. Namun masyarakat menghendaki kedepan tidak terjadi lagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kriminalitas, khususnya pelecehan seksual. Mengatasi masalah ini pihak kepolisian bersama dengan tokoh masyarakat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga kasus-kasus kriminalitas, khususnya pelecehan seksual tidak terjadi lagi.

Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa di Kecamatan Seririt ada pada kategori rawan konflik dan cukup rawan konflik. Analisis data menunjukkan tujuh desa ada pada kategori rawan konflik dan empat belas desa ada pada kategori cukup rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Seririt dapat disajikan sebagai berikut:



Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Busungbiu tidak sekomplek masalah yang terjadi di Kecamatan Banjar maupun di Kecamatan Seririt. Masalah yang utama terjadi di Kecamatan Busungbiu adalah kriminalitas. Sedangkan partai politik tidak menjadi pemicu terjadinya konflik, karena hanya ada satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang berasal dari Kecamatan Busungbiu yang bersasal dari satu partai politik. Dengan adanya perubahan daerah pemilihan akan sangat menguntungkan bagi Kecamatan Busungbiu, karena memperoleh kursi tambahan yang dapat menampung lebih banyak lagi calon anggota dewan dan partai politik yang berkompetisi di Kecamatan Busungbiu. Aspirasi masyarakat Kecamatan Busungbiu juga akan semakin mudah disampaikan, karena bisa diteruskan oleh semakin banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bersasal dari daerah pemilihan Kecamatan Busungbiu. Namun demikian, karena adanya eforia penambahan kursi juga perlu diwaspadai, karena akan membuat banyak tokoh merasa lebih pantas dibandingkan dengan tokoh lainnya dan tak jarang sulit mengakui keunggulan pihak lainnya. Masalah yang urgen di Kecamatan Busungbiu adalah masalah kriminalitas berkaitan dengan pencurian dan pengarus minuman keras yang mengakibatkan terjadinya tidak pidana. Pencurian yang dilakukan oleh oknum masyarakat biasanya diselesaikan secara kekeluargaan atau perdamaian dengan perjanjian tidak mengulagi perbuatannya. Masalah yang prinsip berkaitan dengan tindak pidana di Kecamatan Busungbiu adalah masalah pengaruh minuman keras yang mengakibatkan pembunuhan. Kasus ini telah diselesaikan secara yuridis dan diterima oleh kedua belah pihak, sehingga dinilai tidak akan menjadi pemicu konflik dikemudian hari.

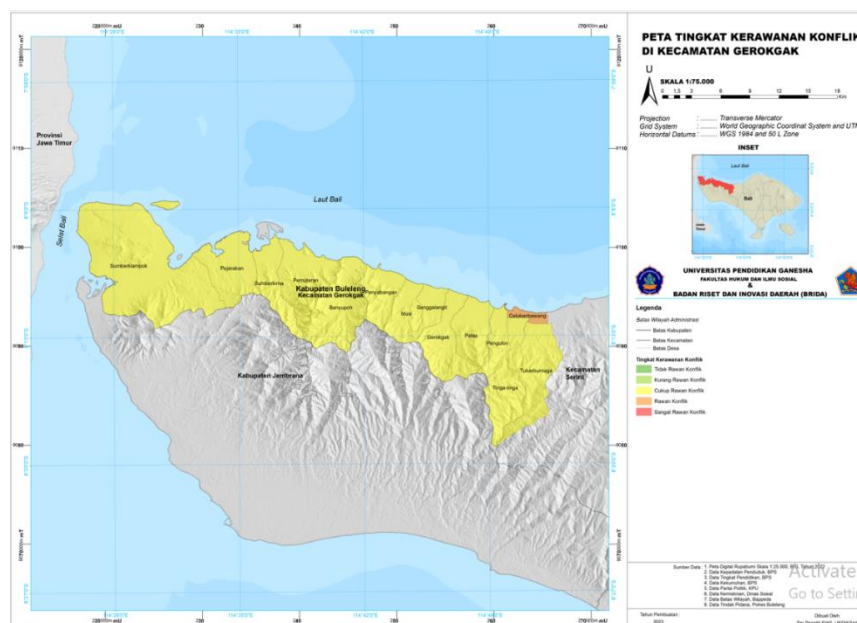
Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa yang ada di Kecamatan Busungbiu ada pada kategori rawan konflik dan cukup rawan konflik. Satu desa di Kecamatan Busungbiu ada pada kategori rawan konflik yaitu Desa Dadap Putih dan sisanya ada pada kategori cukup rawan konflik. Sedangkan empat belas desa lainnya masuk dalam kategori cukup rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Busungbiu dapat disajikan sebagai berikut:



Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Gerokgak hampir sama dengan Kecamatan lainnya, karena menyangkut partai politik, ekonomi, batas wilayah, dan kriminalitas. Variabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Disisi lain, Kecamatan Gerokgak memiliki calon Bupati atau Wakil Bupati yang

cukup kuat dengan dukungan yang sangat baik dari masyarakat Kecamatan Gerokgak. Bahkan panatisme terhadap calon Bupati atau Wakil Bupati yang berasal dari Kecamatan Gerokgak sangat tinggi, sehingga memungkinkan memicu terjadinya konflik. Disisi lain Kecamatan Gerokgak dengan tingkat keragaman agama dan pilihan politik yang panatis akan sangat rawan memicu terjadinya konflik politik menjelang pemilihan umum serentak Tahun 2024. Secara ekonomi juga adanya penolakan terhadap bongkar muat ternak babi yang dilakukan di Pelabuhan Celukan Bawang oleh masyarakat. Masalah lainnya adalah permasalahan batas wilayah dan pertanahan seperti belum adanya kesepakatan tapal batas antar desa dan konflik tanah antara masyarakat dengan perusahaan. Masalah lainnya adalah kriminalitas, berkaitan dengan pencurian, judi online, pengeroyokan, illegal logging, masalah nyepi dan kasus pembunuhan terhadap anak. Kasus kriminalitas pencurian berkaitan dengan pencurian ayam yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Kasus-kasus pencurian biasanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dengan perjanjian di Kantor Desa. Sedangkan masalah illegal logging berkaitan dengan pencurian kayu hutan negara yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa di Kecamatan Gerokgak ada pada kategori rawan konflik dan cukup rawan konflik. Satu desa di Kecamatan Gerokgak ada pada kategori rawan konflik yaitu Desa Celukan Bawang. Sebanyak tiga belas desa di Kecamatan Gerokgak masuk dalam kategori cukup rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Ini menunjukkan di Kecamatan Gerokgak tidak ada kontribusi yang positif dari pemicu terjadinya konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Gerokgak dapat disajikan sebagai berikut:



C. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa rencana tindak lanjut yang relevan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memitigasi kerawanan konflik pada masing-masing Desa/Kelurahan dan Kecamatan. **Pertama**, meningkatkan kewaspadaan (misi khusus pada Bimas dan Babinkamtibmas) pada tiga wilayah yang memiliki tingkat kerawanan konflik paling tinggi, yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Banjar. Pada Kecamatan Buleleng terdapat lima belas desa/kelurahan yang ada pada kategori rawan konflik dan empat belas desa lainnya ada pada kategori cukup rawan konflik. Pada Kecamatan Seririt terdapat tujuh desa/kelurahan yang ada pada kategori rawan konflik dan empat belas desa lainnya ada pada kategori cukup rawan konflik. Pada Kecamatan Banjar terdapat empat desa yang masuk kategori rawan konflik, dua belas desa masuk kategori cukup rawan konflik dan satu desa masuk dalam kategori kurang rawan konflik. Tingkat kerawanan konflik pada ketiga kecamatan ini dipicu oleh masalah politik dan masalah tapal batas yang memiliki bobot paling tinggi dalam resiko konflik.

Kedua, secara khusus melakukan kewaspadaan (penerjunan intelijen sipil) pada desa atau kelurahan yang masuk kategori rawan konflik, yaitu Kecamatan Tejakula Desa Bondalem dan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan Desa Kubutambahan, Kecamatan Sawan Desa Bungkulan, Kecamatan Sukasada Desa Selat, Panji Anom, Panji dan Sambangan, Kecamatan Buleleng Desa Alasangker, Jinengdalem, Penarukan, Banyuning, Astina, Banjar Jawa, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Bugis, Kampung Anyar, Kaliuntu, Banyuasri, Baktiseraga, Pemaron dan Kalibukbuk, Kecamatan Banjar Desa Kaliasem, Dencarik, Banjar Tegeha, dan Banjar, Kecamatan Seririt Desa Pangkung Paruk, Ularan, Lokapaksa, Petemon, Seririt, Pengastulan, dan Tangguwisia, Kecamatan Busungbiu Desa

Tista/Dadap Putih, Kecamatan Gerokgak Desa Celukan Bawang. Pemerintah mesti menerjunkan intelijen sipil untuk memantau situasi dan kondisi yang terjadi pada desa/kelurahan yang masuk dalam kategori rawan konflik, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024.

Ketiga, membuatkan regulasi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan wilayah industri pada Kecamatan Gerokgak. Kecamatan Gerokgak yang saat ini dikembangkan menjadi kawasan industri oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengalami perkembangan yang sangat pesat secara ekonomi, serta menarik investor dari berbagai wilayah untuk membangun industri di Kecamatan Gerokgak. Masuknya investor di Kecamatan Gerokgak tidak jarang menyebabkan terjadinya gesekan antara masyarakat dengan pengusaha.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan sebagaimana digambarkan di atas, ada beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan dari kegiatan penelitian ini. **Pertama**: hasil analisis data kualitatif dan kuantitatif menunjukkan Kecamatan Buleleng merupakan Kecamatan yang menduduki tingkat kerawanan konflik yang paling tinggi dibandingkan dengan sembilan kecamatan lainnya. Ada sebanyak lima belas desa/kelurahan yang masuk dalam kategori rawan konflik dan empat belas desa/kelurahan ada pada kategori tidak rawan konflik. Kecamatan Seririt menempati posisi nomor dua sebagai kecamatan yang rawan konflik, karena terdapat tujuh desa/kelurahan yang ada pada kategori rawan konflik dan empat belas desa lainnya ada pada kategori cukup rawan konflik. Kecamatan Banjar menjadi kecamatan yang berada pada urutan nomor tiga sebagai kecamatan rawan konflik dibandingkan dengan sembilan kecamatan lainnya. Ada empat desa yang masuk kategori rawan konflik, dua belas desa masuk kategori cukup rawan konflik dan satu desa masuk dalam kategori kurang rawan konflik. **Kedua**, rencana tindak lanjut yang relevan adalah meningkatkan kewaspadaan (misi khusus pada Bimas dan Babinkamtibmas) pada tiga wilayah yang memiliki tingkat kerawanan konflik paling tinggi, yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Banjar. Secara khusus melakukan kewaspadaan (penerjunan intelijen sipil) pada desa atau kelurahan yang masuk kategori rawan konflik, yaitu Kecamatan Tejakula Desa Bondalem dan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan Desa Kubutambahan, Kecamatan Sawan Desa Bunggulan, Kecamatan Sukasada Desa Selat, Panji Anom, Panji dan Sambangan, Kecamatan Buleleng Desa Alasangker, Jinengdalem, Penarukan, Banyuning, Astina, Banjar Jawa, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Bugis, Kampung Anyar, Kaliuntu, Banyuasri, Baktiseraga, Pemaron dan Kalibukbuk, Kecamatan Banjar Desa Kaliasem, Dencarik, Banjar Tegeha, dan Banjar, Kecamatan Seririt Desa Pangkung Paruk, Ularan, Lokapaksa, Petemon, Seririt, Pengastulan, dan Tangguwisia, Kecamatan Busungbiu Desa Tista/Dadap Putih, Kecamatan Gerokgak Desa Celukan Bawang. Membuatkan regulasi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan

wilayah industri pada Kecamatan Gerokgak untuk meminimalisasi potensi konflik antara pengusaha dengan masyarakat di Kecamatan Gerokgak.

DAFTAR PUSTAKA

- Borg, W. R. and M. D. Gall. (1989). *Educational Research: An Introduction. Fifth Edition*. New York and London: Longman
- Creswell, J. W., 2008, *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson. [Google Scholar]
- Spradley, J. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono., (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suastika I. N. (20218-2019) penguatan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika melalui Pengembangan model pendidikan karakter berbasis media social. *Laporan Penelitian*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/2/Main.aspx#>
- Fitharyono, I. *Konflik Dan Kebijakan Publik: Peran Pemerintah Dalam Mengelola Konflik Ojek Konvensional Dan Ojek Online Di Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55542/1/IRSHAT%20FITHARYONO.FISIP.pdf>
- Arifinsyah, A. (2019). Analisis Deskriptif Peta Konflik Umat Beragama Di Sumatera Utara. *Jurnal Ushuluddin*, 17(1).
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ushuluddin/article/viewFile/4869/2266>
- Sjafari, A. (2014). PEMETAAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2).
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/2399/1866>
- Indriana, N. (2017). PEMETAAN KONFLIK DI TIMUR TENGAH:(Tinjauan Geografi Politik). *An-Nas*, 1(1), 12-23. <https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/an-nas/article/view/166/134>
- Hasan, E., Apritasari, C. M., & Fadlia, F. (2018, July). Sipabio Analysis in Mapping the Conflict during Simultaneous Local Election 2017 at Kota Sabang. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 175, No. 1, p. 012165). IOP Publishing.
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/175/1/012165/pdf>
- Anom, E., Noor, D. V., Anom, E. S., & Sinaga, O. (2020). Conflict Mapping Communication in an Effort to Reduce Social Conflict to Overcome Social Problems in Riau Province, Indonesia. *Journal of Talent Development and Excellence*, 12(1), 2418-2447.
<https://www.researchgate.net/profile/Erman->

Anom/publication/349029596_Conflict_Mapping_Communication_in_an_Effort_to_Reduce_Social_Conflict_to_Overcome_Social_Problems_in_Riau_Province_Indonesia/links/601be3f9299bf1cc26a0899f/Conflict-Mapping-Communication-in-an-Effort-to-Reduce-Social-Conflict-to-Overcome-Social-Problems-in-Riau-Province-Indonesia.pdf

Barkah, S., & Sobri, K. M. (2016). Dinamika Konflik Etnis di Toboali Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Empirika*, 1(2), 187-202. <http://journalempirika.fisip.unsri.ac.id/index.php/empirika/article/view/26/14>

Ilham, B. U. (2013). Studi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Lokasi Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Masyarakat Pulau Lae-lae, Kawasan Benteng Somba Opu dan Kawasan Wisata Bantimurung). *Prosiding PESAT*, 5. <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/pesat/article/viewFile/1215/1079>